

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang tidak hanya mengedepankan *profit oriented* saja, melainkan suatu lembaga keuangan yang juga mengedepankan kemaslahatan masyarakat sesuai dengan tuntutan syari'ah yang menjadi landasan dari semua lembaga keuangan syari'ah.<sup>1</sup> Salah satu aplikasinya adalah menerapkan pelayanan (*service*) yang berbasis moral dan spiritual.

Bank syari'ah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan syari'ah.<sup>2</sup>

Bank syari'ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari'ah, dimana sejumlah instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari'ah selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial.

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 67.

<sup>2</sup> Veithhzal Rivai, *Islamic Banking*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm. 31.

Dalam memberikan pelayanan lembaga keuangan syariah sudah semakin lengkap sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dari produk penghimpunan dana (*funding*), pembiayaan (*landing*) sampai dengan produk tambahan berupa jasa (*service*).<sup>3</sup> Salah satu dari produk pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah adalah produk pembiayaan *take over* modal kerja dengan akad *qardh* dan *murabahah* yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri.

Dalam konsep pembiayaan di perbankan, bank dapat memberikan pembiayaan kepada nasabah berupa pembiayaan konsumtif, investasi, modal kerja, maupun kerja sama pembiayaan yang diimplementasikan dalam kerja sama modal kerja<sup>4</sup>. Adapula pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah dimana sebelumnya nasabah tersebut masih memiliki fasilitas pinjaman di bank lain, terutama yang berasal dari bank konvensional. Pembiayaan inilah yang disebut dengan pembiayaan *take over*.

*Take over* adalah pengambilalihan, atau pengambilalihan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Menurut istilah dalam bank Syariah, *take over* merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah yang untuk membantu masyarakat mengalihkan transaksi non syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah atas permintaan nasabah.<sup>5</sup>

Bank syariah melakukan pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional dengan cara memberikan jasa *hiwalah*, dengan adanya jasa *hiwalah*

---

<sup>3</sup> Kasmir, *dasar-dasar perbankan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 33-36

<sup>4</sup> Syafi'i Antonio, *Perbankan syariah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.160-161

<sup>5</sup> Adiwarman A karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2013), hlm. 248.

ini maka bank akan mendapatkan *fee* atau upah dari jasa tersebut. Atau dapat juga menggunakan *qardh*, disesuaikan dengan ada atau tidaknya unsur bunga dalam hutang nasabah kepada lembaga keuangan konvensional.<sup>6</sup>

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/ mentah, bahan penolong/pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, piutang, dan lain-lain.<sup>7</sup>

Prosedur penyelesaian hutang yang dilakukan secara *take over* dengan tujuan untuk modal kerja yang dilakukan oleh Bank Syariah berlanjut pada transaksi yang terjadi antara nasabah dan bank syariah. Nasabah dan bank syariah membuat perjanjian pelunasan hutang pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad *qardh* dan *murabahah*.

Secara bahasa, *al-qardh* adalah kata turunan dari *qaradha*. Ia berarti *al-qath'* (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan. Secara istilah, ia adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dengan demikian, dalam *qardh* tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian.<sup>8</sup>

Secara bahasa, *Al-murabahah* berasal dari kata Bahasa Arab *al-ribh* (keuntungan). Ia dibentuk dengan wazan (pola pembentukan kata) *mufa'alat* yang mengandung arti saling. Oleh karenanya, secara bahasa ia berarti saling memberi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 248-249.

<sup>7</sup> Veithhazal Rivai *Op cit* hlm. 718.

<sup>8</sup> Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 266.

keuntungan.<sup>9</sup> *Murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>10</sup>

Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha menggunakan alternatif akad *Qardh* dan *Murabahah* untuk mengalihkan hutang. Akad ini secara teori tidak menjadi persoalan karena memang diperbolehkan secara syariah. Namun dalam aplikasinya ketentuan akad *qardh* dan *murabahah* yang digunakan oleh Bank Syariah Mandiri ini tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam Fatwa-DSN-MUI No : 31/ DSN-MUI/ VI/2002 tentang pengalihan hutang. Menurut hasil wawancara yang sudah saya lakukan dengan salah satu pegawai Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha bapak Ilham Munazat, objek yang ditransaksikan dalam *take over* disini adalah hutang nasabah di bank sebelumnya yang tujuan di bank sebelumnya untuk modal kerja dengan syarat adanya jaminan berupa tanah dan bangunan dengan bukti kepemilikan Serifikat Hak Milik.

Karena modal kerja secara kolektif mencakup aktiva lancar (*Current Asset*), aktiva lancar mencakup kas dan aktiva lainnya yang diperkirakan dapat direalisasikan atau dijual atau digunakan selama satu siklus operasi normal perusahaan. Komponen dalam aktiva lancar adalah persediaan barang. Persediaan barang umumnya terdiri dari bahan baku, persediaan setengah jadi (dalam proses), dan barang jadi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid* hlm. 255.

<sup>10</sup> Fatwa DSN MUI. No.04/ DSN-MUI/ IV/2000 tentang Muarabahah

<sup>11</sup> Tampubolon Manahan, *Manajemen keuangan*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 55.

Sehingga apabila bank menggunakan akad *murabahah* dalam pembiayaan *take over* modal kerja ini tidak adanya kejelasan asset yang akan dijual oleh bank syariah mandiri kepada nasabah. Salah satu rukun sah nya akad *murabahah* adalah harus ada *ma'kud alaih* (objek akad) dan salah satu syaratnya adalah barang yang diakadkan harus ada di tangan.<sup>12</sup> *Take over* dengan akad *murabahah* ini seharusnya tidak bisa dilakukan apabila tujuan di bank sebelumnya untuk modal kerja karena asset yang akan di *take over* sudah tidak ada, sudah berputar atau sudah terjual.

Di dalam penelitian, penulis melihat adanya keganjalan terhadap penerapan akad pembiayaan *take over* modal kerja di bank syariah mandiri KCP Moh.Toha dengan yang sudah diatur dalam fatwa DSN MUI, Transaksi pengalihan hutang atau *take over* pembiayaan dari bank konvensional ke bank syariah sudah diatur dalam fatwa No.31/DSN-MUI/ VI/ 2002 tentang pengalihan hutang. Dalam Fatwa ini disebutkan ada empat alternatif akad yang digunakan yaitu:

1. *Qardh* dan *Murabahah*
2. *Syirkah Al-milk* dan *Murabahah*
3. *Qardh* dan *Ijarah*
4. *Qardh* dan IMBT (*Ijarah Muntahiya bit-Tamlik*)<sup>13</sup>

Bank syariah mandiri KCP Moh.Toha belum sepenuhnya menerapkan konsep pembiayaan *take over* seperti yang sudah diatur dalam Fatwa-DSN-MUI No : 31/ DSN-MUI/ VI/2002 tentang pengalihan hutang dengan menggunakan akad *qardh* dan *murabahah*. Di dalam fatwa tersebut MUI menjelaskan 4

---

<sup>12</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 146.

<sup>13</sup> Dewan syariah Nasional MUI, 2000, hlm. 185

alternatif akad yang dapat digunakan pihak perbankan untuk memberikan fasilitas pembiayaan *take over* kepada nasabah. Akan tetapi pada pelaksanaannya pihak bank belum sepenuhnya menerapkan keempat konsep tersebut yang sesuai dengan syariah. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi fatwa itu sendiri sebagai pedoman pelaksanaan transaksi-transaksi di perbankan syariah. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti hal tersebut sebagai pemenuhan tugas akhir skripsi program studi Muamalah.

## **B. Rumusan Masalah**

Model penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha, dimana adanya kesenjangan dalam pelaksanaan *take over* modal kerja yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri dengan yang sudah diatur didalam fatwa tentang pengalihan utang. Adapun bentuk akad yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri yaitu menggunakan akad *Qardh* dan *Murabahah*. Berdasarkan masalah ini ditarik beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi latar belakang pembiayaan *take over* modal kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha?
2. Bagaimana mekanisme pembiayaan *take over* modal kerja dengan akad *Qardh* dan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan *take over* modal kerja?

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang pembiayaan *take over* modal kerja di Bank Syariah Mandiri KCP Moh. Toha
2. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan *take over* modal kerja dengan akad *Qardh* dan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Moh Toha
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pembiayaan *take over* modal kerja

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini tentunya mempunyai manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, baik untuk diri peneliti, aktivitas akademika dan lembaga keuangan syariah.

#### 1. Bagi Diri Sendiri

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme pembiayaan *take over* modal kerja dengan akad *qardh* dan *murabahah* pada lembaga keuangan syariah yang saat ini banyak diminati oleh masyarakat.

#### 2. Bagi Civitas Akademika

Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh civitas akademika khususnya yang berda dilingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memiliki konsentrasi didalam hukum perbankan Syariah sehingga ini menjadi bekal bagi para akademisi didalam memberikan sikap dan pendapat mengenai praktek di perbankan syariah.



### 3. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Bagi lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu acuan atau pedoman didalam meningkatkan produk-produk yang di tawarkan didalam bank syariah dalam penyaluran pembiayaan *take over*. Sehingga masyarakat dapat lebih tertarik untuk memilih bank syariah sebagai solusi dari pada memilih bank konvensional.

### E. Kerangka Pemikiran

Menurut kamus besar bahasa Indonesia kredit atau pembiayaan adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara berangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain.

Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>14</sup>

*“Menurut Wangsawidjaja pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musharakah, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istisna, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk Qardh, dan, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa”*<sup>15</sup>

<sup>14</sup> UU No 21 tahun 1998, 2008: 135.

<sup>15</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 78-79.



Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>16</sup>

Dalam penyaluran dana Bank Syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan dengan hal itu, bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dana berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Menurut Syafi'i Antonio sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:<sup>17</sup>

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal berikut:
  - a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seperti :
    - 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi dan
    - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 79.

<sup>17</sup> Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 160-161.

- b. Pembiayaan investasi yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*Capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

*“Menurut Adiwarman Karim yang dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) Syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas PMK dapat diberikan kepada seluruh sector/ subsector ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariat islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”<sup>18</sup>*

*Salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan bank syariah adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi nonsyariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah.. Dalam pembiayaan berdasarkan take over ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah kepada bank konvensional menjadi dua macam, yaitu (1) hutang pokok + Bunga (2) hutang pokok saja. Dalam menangani hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok plus bunga, bank syariah memberikan jasa qardh karena alokasi penggunaan qardh tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang yang berbasis bunga. Sedangkan terhadap hutang nasabah yang berbentuk hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa hiwalah atau pengalihan hutang karena hiwalah tidak bisa untuk menalangi hutang yang berbasis bunga.”<sup>19</sup>*

Secara istilah *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqh, *qardh* dikategorikan dalam akad tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.<sup>20</sup>



<sup>18</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 234.

<sup>19</sup> *Ibid* hlm. 249

<sup>20</sup> Syafi'I Antonio *Op cit* hlm. 131

Sedangkan *murabahah* sebagai bagian akad yang kedua dari pembiayaan *take over* modal kerja yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.<sup>21</sup> Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati” karakteristik *murabahah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, II, hlm.293

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual atau pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).<sup>23</sup>

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اِثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ (رواه ابوداود والترمذی)

“Dari Abi Haurairah r.a dari Nabi Saw. Bersabda: janganlah dua orang yang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai” (Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi).

Yang menjadi landasan dalil dalam hadist ini adalah kita diseru untuk “melakukan jual beli dalam satu majlis dan tidak boleh berpisah sebelum penjual dan pembeli saling meridhoi”.

Oleh karena, perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

### 1. Rukun Jual Beli

Adapun yang menjadi rukun dalam perbuatan hukum jual beli terdiri dari: Adanya pihak penjual dan pembeli, adanya uang dan benda, dan adanya lafal. Dalam suatu perbuatan jual beli, ketiga rukun itu hendaklah dipenuhi, sebab

---

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *fiqh muamalah*, (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 70

apabila salah satu rukun tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.<sup>24</sup>

## 2. Syarat Sahnya Jual Beli

Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang subjeknya, tentang objeknya, dan tentang lafal.

### a. Tentang Subjeknya

Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli haruslah: Berakal agar dia tidak terkecoh, orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, dengan kehendaknya sendiri (bukan dipaksa), keduanya tidak mubazir, baligh dan beragama islam.<sup>25</sup>

### b. Tentang Objeknya

Yang dimaksud dengan objek jual beli di sini adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli ini haruslah memenuhi syarat-syarat berikut: bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya, mengetahui, dan barang yang diakadkan ada di tangan (dikuasai).<sup>26</sup>

### c. Tentang lafal atau ijab Kabul

Syarat sah nya ijab kabul adalah jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya, jangan diselingi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul, dan beragama islam.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 140.

<sup>25</sup> Hendi Suhendi *Op cit* hlm. 74-75

<sup>26</sup> Suhrawardi K Lubis *Op cit* hlm. 142

<sup>27</sup> Hendi Suhendi *Op cit* Hlm. 71

## F. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menyelesaikan karya tulis ini ada beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis diantaranya:

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode deskriptif Analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan dan menganalisis keadaan objek penelitian pada saat sekarang yaitu pelaksanaan pembiayaan *take over* modal kerja dengan akad *Murabahah*. Deskriptif Analisis adalah metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasusistik, dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan. Serta mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Tipe penelitian Deskriptif analisis seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti pelaksanaan pembiayaan *take over* modal kerja dengan akad *murabahah* di Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Moh Toha Jl. Moh Toha No.184 Bandung 40243 Jawa Barat.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah mandiri Cabang Pembantu Moh Toha Jl. Moh Toha No.184 Bandung 40243 Jawa Barat.

### 3. Jenis Data

Kategori data yang digunakan penulis dalam karya tulis ini adalah data kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif. Dalam menganalisis data yang bersifat kualitatif diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Proses satuan (uniting), (2) kategorisasi, (3) penafsiran. Dan data-data tersebut tentu saja data yang berhubungan dengan inti masalah yang akan dibahas, yaitu pelaksanaan pembiayaan *take over* modal kerja dengan akad *murabahah* di Bank Syariah Mandiri.

### 4. Sumber Data

Dalam proses pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data dari dua sumber yaitu:

- a. Primer, adalah keterangan atau penjelasan dari orang-orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini. Dalam hal ini data yang dijadikan data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber-sumbernya baik itu data yang diperoleh dalam bentuk file dan selebaran ataupun yang diperoleh secara lisan dan tulisan melalui proses wawancara. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini peneliti bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja. Untuk itu pertanyaan-pertanyaan disusun dengan rapi dan ketat.
- b. Sekunder, adalah tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan pembahasan dalam penelitian ini. Baik berupa selebaran yang berkaitan



dengan masalah yang dibahas, namun lebih ditekankan pada informasi yang bersumber dari buku yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang dibahas

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Wawancara, teknik ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data dan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang diteliti. Adapun wawancara yang dilakukan yaitu dengan narasumber Bapak Ilham Munazat selaku Analis Mikro di BSM KCP MohToha, pada tanggal 21 Maret 2016 di Bank Syariah Mandiri KCP Moh.Toha dan juga dengan narasumber Bapak Yudi Suryana selaku nasabah BSM KCP Moh.toha pada tanggal 26 Juli 2016 di Saluyu Selatan desa Sayati kecamatan Margahayu kab.Bandung.
- b. Dokumentasi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dokumentasi didefinisikan sebagai sesuatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.<sup>28</sup>  
Dokumentasi dari penelitian ini berupa Surat-Surat seperti akad kontrak, brosur, dan hasil wawancara dengan pihak bank dan nasabah.
- c. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari sejumlah referensi kepustakaan sampai pada tahap menganalisis materi bacaan dalam kategori ilmu ekonomi islam, yang

---

<sup>28</sup> Pusat bahasa Kamus Besar bahasa Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2008), hlm. 120.

dipilih sedemikian rupa berdasarkan perhitungan relevansi dan kebaruan bahan-bahan bacaan tadi.

#### 6. Analisis data

Ada beberapa langkah yang dilakukan oleh penulis dalam menganalisis data yang diperoleh yaitu:

- a. Mengkaji semua data yang telah diperoleh, baik itu hasil wawancara ataupun hasil studi kepustakaan.
- b. Mengklasifikasikannya ke dalam satuan unit dengan pernyataan penelitian
- c. Mengklasifikasikan lagi data yang telah diklasifikasikan tadi dengan kerangka pemikiran.
- d. Mencari titik temu antara data dan reference yang telah terkumpul dengan realita di lapangan
- e. Mencari kesimpulan yang diperlukan dari data yang dianalisis dengan mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian.